

**TESIS**

**KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM**

***CRIMINAL POLICY ON FORFEITURE OF ASSETS RESULTING FROM  
GRATIFICATION IN CASES STOPPED BY LAW***



**Oleh:**

**GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA**

**NIM. 2210622067**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**TESIS**

**KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK  
PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG  
DIHENTIKAN DEMI HUKUM**

***CRIMINAL POLICY ON FORFEITURE OF ASSETS  
RESULTING FROM GRATIFICATION IN CASES STOPPED BY  
LAW***



**Oleh:**

**GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA**

**NIM. 2210622067**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK  
PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG  
DIHENTIKAN DEMI HUKUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA**  
**NIM. 2210622067**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:  
**GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA**  
**NIM. 2210622067**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS  
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIK. 216121211

**Pembimbing 2**



**Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIK. 486011310391

**TESIS**

**KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM**

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**GUSTI NGURAH AGUS SUMARDIKA**  
**NIM. 2210622067**

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Pada Tanggal 30 Mei 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan**

**Menyetujui:**

**Pembimbing 1**

**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIK. 216121211

**Pembimbing 2**

**Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIK. 486011310391

**Koordinator Program Studi  
Magister Hukum**

**Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,  
M.H., M.Tr.Adm.Kes.**  
NIP. 199304282022031009

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Suherman, S.H., LL.M.**  
NIP. 197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gusti Ngurah Agus Sumardika  
NIM : 2210622067  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMBEL', and the serial number 'B6AAKX742370003'.

Gusti Ngurah Agus Sumardika  
NIM. 2210622067

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Ngurah Agus Sumardika

NIM : 2210622067

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '10000', 'MILITASI', and 'TEMPER'. The signature is stylized and covers most of the stamp's details.

Gusti Ngurah Agus Sumardika  
NIM. 2210622067

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Kebijakan Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Gratifikasi Pada Perkara Yang Dihentikan Demi Hukum", sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan moril dan materiil sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bpk.Dr.Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
2. Bpk.Dr.Suherman, SH.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
3. Bpk.Dr.Handar Subhandi Bakhtiar,SH.,MH.,M.Tr.,Adm.Kes selaku Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
4. Bpk.Dr.Handoyo Prasetyo, SH., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Bpk. Dr.Slamet Tri Wahyudi, SH., M.H. selaku dosen pembimbing 2, serta Bpk.Prof.Dr.Bambang Waluyo,SH.,MH. selaku dosen Penguji 1 dan Bpk.Dr.Beniharmoni Harefa,SH.,MH. selaku dosen Penguji 2, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, semangat dan motivasi;
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;



6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta;
7. Keluarga tercita Bapak, Ibu, Istri dan anak-anak yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat dalam penyusunan tesis ini;
8. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum tahun 2022 Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta.

Penulis menyadari tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan tesis ini sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, aparat penegak hukum serta bagi masyarakat luas.

Jakarta, 30 Mei 2024

TTD

Gusti Ngurah Agus Sumardika

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PADA PERKARA YANG DIHENTIKAN DEMI HUKUM

Gusti Ngurah Agus Sumardika (2210622067), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri  
Wahyudi

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan masifnya perilaku koruptif di Indonesia, baik melalui sarana penindakan (*represif*) maupun pencegahan (*preventif*), namun hal tersebut belum berdampak signifikan dalam menurunkan *crime rate* korupsi dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para koruptor, karena setiap tahun data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung meningkat. Pola pemberantasan korupsi telah mengalami perubahan, aparat penegak hukum tidak lagi hanya mengejar pelaku tindak pidana dan memenjarakannya (*follow the suspect*), namun juga melakukan upaya penelusuran, penyitaan dan perampasan seluruh aset atau harta kekayaan yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana (*follow the money*). Berbagai kendala muncul dalam upaya perampasan aset yang merupakan hasil atau instrumen tindak pidana, salah satunya adalah tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Putusan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam perampasan benda sitaan berupa aset tersangka tindak pidana gratifikasi yang perkaranya dihentikan demi hukum dimasa yang akan datang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perampasan aset didalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan sehingga perampasan aset masih berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based asset forfeiture*), selain melalui mekanisme pidana perampasan aset juga dapat dilakukan melalui mekanisme perdata dengan konsep *non conviction based asset forfeiture*, namun tidak ada satupun aturan yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum. Kebijakan pidana perampasan aset dimasa yang akan datang berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dengan konsep (*non conviction based asset forfeiture*) telah mengatur dengan jelas mekanisme perampasan aset milik Tersangka atau Terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga dapat mengatasi kekosongan hukum dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana gratifikasi pada perkara yang dihentikan demi hukum.

**Kata Kunci:** kebijakan pidana, tindak pidana korupsi, perampasan aset, perkara dihentikan demi hukum.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL POLICY ON FORFEITURE OF ASSETS RESULTING FROM GRATIFICATION IN CASES STOPPED BY LAW**

Gusti Ngurah Agus Sumardika (2210622067), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri

Wahyudi

*The Indonesian government has made various efforts to suppress the massive corruptive behavior in Indonesia, both through means of law enforcement and prevention, but this has not had a significant impact in reducing the crime rate of corruption and providing a deterrent effect to the corruptors, because every year data on handling cases of corruption crimes in Indonesia tends to increase. The pattern of combating corruption has changed, law enforcement officials no longer only pursue criminal offenders and imprison them (follow the suspect), but also carry out efforts to trace, confiscate and Forfeit all assets that are the proceeds and instruments of criminal acts (follow the money). Various obstacles arise in efforts to seize assets that are the proceeds or instruments of criminal acts, one of which is the absence of legal rules governing the mechanism for the seizure of assets resulting from gratification crimes in cases that are stopped by law. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach (statue approach) and Court Decisions. This reserach aims to examine and formulate an ideal criminal law policy in the seizure of confiscated objects in the form of assets of gratification suspects whose cases are stopped for the sake of law in the future. The results in this research show that asset seizure in the eradication of corruption currently still places asset seizure as an additional crime so that asset seizure is still based on the defendant's guilt (conviction based asset forfeiture), in addition to through the criminal mechanism of asset forfeiture can also be done through civil mechanisms with the concept of non-conviction based asset forfeiture, but there is no rule governing the asset forfeiture mechanism proceeds of gratification in cases that are stopped by law. The criminal policy of asset seizure in the future based on the Asset Forfeiture Bill related to Criminal Acts with the concept (non-conviction based asset forfeiture) has clearly regulated the mechanism for the seizure of assets belonging to Suspects or Defendants who died, escaped, became permanently ill, or whose whereabouts are unknown, so as to overcome the legal vacuum in terms of seizure of assets resulting from gratification crimes in cases that are stopped by law.*

**Keywords:** *criminal policy, corruption, asset seizure, case stopped by law.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Kajian Teoritis .....	13
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Keadilan .....	15
B. Kerangka Pikir .....	16
C. Definisi Operasional.....	16
1. Politik Hukum Pidana atau Kebijakan Kriminal.....	17
2. Korupsi .....	21
3. Gratifikasi.....	23
4. Benda sitaan .....	23
5. Aset dan perampasan aset.....	24

6. Perkara dihentikan demi hukum .....	24
7. Kerugian Keuangan Negara .....	27
<b>BAB III</b> .....	36
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
D. Analisis Bahan Hukum .....	38
<b>BAB IV</b> .....	39
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
A. Kebijakan Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Gratifikasi Pada Perkara yang Dihentikan Demi Hukum .....	39
B. Kebijakan Pidana Ideal Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Gratifikasi, Yang Perkaranya Dihentikan Demi Hukum Di Masa Depan.....	82
<b>BAB V</b> .....	102
<b>PENUTUP</b> .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	104